



## **INOVASI KEBIJAKAN LAYANAN PADA MODERNISASI TRANSPORTASI ANGKUTAN KOTA METRO TRANS JABAR DI KOTA BANDUNG**

**Annisa Nurfitriyanti<sup>1</sup>, M. Imanudin Wahid<sup>2</sup>, Nazwa Humaida Rihadatulaisyi<sup>3</sup>, Riva Rivanti<sup>4</sup>,  
Ramaditya Rahardian<sup>5</sup>, Rikki Maulana Yusup<sup>6</sup>**

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Sosial dan Humaniora,  
Universitas Muhammadiyah Bandung, Bandung, Indonesia

Email: [rihanazwa13@gmail.com](mailto:rihanazwa13@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*The modernization of public transportation plays a crucial role in addressing the growing demand for urban mobility. This study examines the implementation of service policy innovation within the Metro Jabar Trans (MJT) program as part of the transformation of city transport services in Bandung. A descriptive qualitative approach was employed by collecting data through direct observation, in-depth interviews with relevant stakeholders, and document analysis. The data were analyzed using the Miles, Huberman, and Saldana model to provide a thorough understanding of the policy execution. The findings reveal that applying the principles of Agile Governance has encouraged a more adaptive management system through the adoption of digital payment mechanisms, strengthened intermodal integration, improvement of service standards, and continuous evaluation to support service refinement. However, the effectiveness of the program remains constrained by the limited fleet capacity, uneven route distribution, and insufficient user awareness regarding the new service system. Therefore, enhanced dissemination efforts, improved supporting facilities, and broader community involvement are required to ensure a more sustainable and effective public transportation service. This research contributes to the development of future sustainable transportation policies in urban areas.*

**Keywords: Service Policy Innovation; Governance, Public Transport Modernization**

### **ABSTRAK**

Modernisasi transportasi publik menjadi aspek penting dalam mengatasi peningkatan kebutuhan mobilitas di wilayah perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan inovasi kebijakan layanan pada program Metro Jabar Trans (MJT) sebagai upaya transformasi angkutan kota di Kota Bandung. Penelitian menggunakan metode kualitatif berpendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, serta studi dokumentasi. Data dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terkait pelaksanaan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip *Agile Governance* mendorong pembaruan tata kelola layanan melalui adopsi sistem pembayaran digital, integrasi jaringan moda transportasi, peningkatan standar pelayanan, dan evaluasi rutin sebagai dasar penyempurnaan layanan. Meskipun demikian, program MJT belum

mencapai tingkat efektivitas yang optimal karena masih dihadapkan pada keterbatasan armada operasional, distribusi layanan yang tidak merata, serta pemahaman pengguna yang belum sepenuhnya terbentuk. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan sosialisasi, pengembangan infrastruktur pendukung, dan partisipasi publik yang lebih luas untuk mewujudkan pelayanan transportasi yang berkualitas dan berkelanjutan. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan perumusan kebijakan transportasi publik di kawasan urban pada masa mendatang.

***Kata Kunci: Inovasi Kebijakan Layanan; Tata Kelola; Modernisasi Transportasi Publik***

## **PENDAHULUAN**

Percepatan urbanisasi di Indonesia telah menimbulkan peningkatan signifikan terhadap kebutuhan mobilitas di kawasan perkotaan. Pertumbuhan jumlah penduduk di wilayah urban berimplikasi pada meningkatnya intensitas perjalanan harian (*commuting*), yang menambah tekanan pada kapasitas jaringan transportasi jalan yang tidak sebanding dengan laju pertumbuhan kendaraan pribadi (Nurchayono et al., 2023). Kondisi tersebut memunculkan berbagai permasalahan seperti kemacetan lalu lintas, ketidakpastian waktu tempuh, serta degradasi kualitas lingkungan akibat polusi dan kebisingan. Situasi ini menuntut adanya modernisasi sistem transportasi publik yang mampu menyediakan layanan mobilitas yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan. Temuan empiris terkait pola penggunaan moda transportasi dan dampak urbanisasi menunjukkan bahwa kebutuhan transportasi perkotaan kini tidak hanya menitikberatkan pada ketersediaan sarana, tetapi juga pada aspek kualitas, keandalan, dan integrasi antarmoda (Nurchayono et al., 2023).

Di berbagai kota besar di Indonesia, khususnya pada Kota Bandung, tingkat urbanisasi mengalami peningkatan yang signifikan seiring dengan fungsinya sebagai pusat pendidikan, industri kreatif, dan pariwisata di Provinsi Jawa Barat. pertumbuhan jumlah penduduk tersebut tidak hanya disebabkan oleh faktor kelahiran alami, tetapi juga dipengaruhi oleh arus migrasi wilayah sekitarnya seperti Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat. proporsi penggunaan kendaraan pribadi masih mendominasi dibandingkan dengan transportasi publik, yang pada gilirannya memperburuk tingkat kemacetan dan mengurangi efisiensi pemanfaatan ruang kota (Ramdani, 2018). Menurut (Harahap, 2013), Urbanisasi dipengaruhi oleh disparitas akses terhadap layanan publik, kesempatan kerja, dan fasilitas pendidikan antara wilayah perdesaan dan perkotaan. Fenomena ini tampak signifikan di Kota Bandung sebagai salah satu tujuan utama urbanisasi, di mana arus migrasi penduduk mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan ruang,

perumahan, serta sistem transportasi. Proses urbanisasi memberikan dampak langsung terhadap peningkatan tingkat mobilitas penduduk.

Penelitian mengenai rencana konversi angkutan kota menuju sistem transportasi massal berbasis bus (Bus Rapid Transit/BRT) di Kota Bandung menunjukkan bahwa rendahnya pengguna transportasi umum dan tingginya ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi menjadi tantangan utama. Upaya modernisasi seperti transformasi angkot menjadi bus, pemberian subsidi operasional, serta integrasi jaringan rute perlu dilaksanakan tidak hanya melalui pendekatan teknis, tetapi juga melalui reformasi dalam aspek pembiayaan dan regulasi agar mampu mendorong perubahan perilaku pengguna transportasi. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan modernisasi transportasi publik menuntut dukungan kebijakan yang mencakup pengaturan tarif, skema pembiayaan berkelanjutan, dan manajemen rute yang efisien untuk menciptakan pergeseran moda transportasi secara nyata (Ramdani, 2018).

Berbagai penelitian di Kota Bandung menunjukkan bahwa penggunaan kendaraan pribadi, baik sepeda motor maupun mobil, jauh lebih dominan dibandingkan dengan angkutan umum. Data daerah menunjukkan rasio kendaraan pribadi yang sangat tinggi, sehingga kontribusi moda transportasi publik terhadap total perjalanan menjadi relatif kecil. Ketimpangan dalam proporsi penggunaan moda ini memperburuk tingkat kemacetan dan menegaskan bahwa modernisasi transportasi perkotaan harus disertai kebijakan yang komprehensif, meliputi pemberian insentif, skema pembiayaan yang tepat, penetapan tarif yang kompetitif, serta perancangan jaringan rute dan halte yang mampu meningkatkan daya saing angkutan umum terhadap kendaraan pribadi. Inisiatif seperti pengembangan sistem rute *trunk-feeder*, pembentukan hirarki moda transportasi, serta pengendalian dan pembatasan lalu lintas kendaraan pribadi menjadi bagian integral dari strategi untuk mendorong perubahan perilaku mobilitas masyarakat menuju pola perjalanan yang lebih berkelanjutan (Ramdani, 2018). Untuk menggambarkan jumlah pengguna transportasi di Kota Bandung, disajikan data kendaraan terdaftar tahun 2025 pada tabel berikut ini:

**Tabel 1 Jumlah Pengguna Transportasi Di Kota Bandung Pada Tahun 2025**

<b>Nama Kendaraan</b>	<b>Nilai</b>
Sepeda Motor	1,81 Juta
Mobil Penumpang	478.986

Mobil Bermuatan	90.012
Bus	6.490
Kendaraan Khusus	984
Total	2,39 Juta

**Sumber:**

***databoks.katadata.co.id (2025)***

Berdasarkan informasi dari *Electronic Registration and Identification (ERI)* Korps Lalu Lintas Polri per tanggal 15 April 2025, jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di Kota Bandung mencapai angka 2,39 juta unit. Dari jumlah tersebut, sepeda motor mendominasi sebagai jenis kendaraan terbanyak, yakni sebanyak 1,81 juta unit. Selanjutnya, mobil penumpang tercatat sebanyak 478.986 unit, diikuti oleh mobil bermuatan sejumlah 90.012 unit. Adapun jumlah bus yang tercatat adalah 6.490 unit, sementara kendaraan khusus (ransus) berjumlah 984 unit. Tingginya angka kepemilikan kendaraan ini mengindikasikan kompleksitas permasalahan transportasi di Kota Bandung, termasuk dampaknya terhadap lalu lintas, kebutuhan pengembangan infrastruktur jalan, serta potensi timbulnya persoalan lingkungan dan manajemen transportasi perkotaan (Fadlurahman, 2025).

Hasil evaluasi terhadap jangkauan halte, waktu kedatangan (*headway*), dan keandalan jadwal layanan transportasi di wilayah Bandung menunjukkan masih adanya kesenjangan antara kebutuhan pengguna dan kinerja sistem angkutan publik. Sebagian besar halte belum menjangkau area dengan potensi permintaan tinggi, seperti kawasan pendidikan dan pusat perkantoran, sementara interval kedatangan armada cenderung tidak konsisten dan informasi layanan belum disampaikan secara optimal kepada penumpang (Indrianawati, 2023). Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya modernisasi transportasi perlu difokuskan pada peningkatan manajemen operasional, termasuk penataan jadwal dan distribusi armada, pengembangan infrastruktur halte yang ramah bagi pejalan kaki, serta penerapan sistem informasi penumpang berbasis waktu nyata (*real-time*) guna meningkatkan kepastian dan kenyamanan perjalanan. Tanpa perbaikan operasional tersebut, efektivitas program modernisasi berpotensi terbatas dan tidak akan secara signifikan memengaruhi perubahan preferensi pengguna terhadap transportasi umum (Indrianawati, 2023).

Kebijakan transportasi publik diatur oleh berbagai regulasi nasional dan daerah. Beberapa di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Perlindungan Keselamatan Pengguna Angkutan Umum. Di tingkat daerah, Pemerintah Kota Bandung memiliki kebijakan dalam mengembangkan transportasi modern melalui program Metro Jabar Trans sebagai bagian dari penguatan Bandung *Smart City*. Tujuan utama kebijakan tersebut adalah meningkatkan efisiensi transportasi, mengurangi tingkat kemacetan, serta mendorong masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Melalui kebijakan inovatif ini, pemerintah daerah berupaya menghadirkan sistem transportasi publik yang berkelanjutan, efisien, dan ramah lingkungan.

Transportasi publik di Kota Bandung memegang peranan penting dalam mendukung mobilitas perkotaan yang efisien dan berkelanjutan, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan operasional. Meskipun Trans Metro Bandung (TMB) dihadirkan sebagai solusi untuk mengurangi kemacetan, kualitas layanan yang rendah, seperti kondisi armada yang tidak terawat, halte yang kotor, dan perilaku pengemudi yang tidak disiplin, telah menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap transportasi publik. Ketidakteraturan jadwal, keterlambatan, serta ketiadaan jalur khusus bus menyebabkan perjalanan tidak efisien dan justru memperparah kemacetan. Di sisi lain, lemahnya manajemen operasional, keterbatasan anggaran, serta kurangnya pengawasan terhadap layanan publik memperburuk efektivitas sistem. Fasilitas pendukung yang tidak memadai dan rute yang belum merata di seluruh wilayah kota turut membatasi aksesibilitas layanan. Dengan demikian, upaya modernisasi transportasi publik di Bandung memerlukan perbaikan menyeluruh, baik dalam aspek infrastruktur, manajemen, maupun pelayanan, agar tujuan menciptakan sistem mobilitas perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan dapat tercapai (Yuniarti et al., 2022).

Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menggunakan transportasi publik menjadi hambatan utama dalam upaya modernisasi transportasi di Bandung. Persepsi negatif terhadap angkutan umum yang dianggap tidak nyaman, kurang aman, dan tidak tepat waktu ditambah minimnya sosialisasi dan kampanye perubahan perilaku, menyebabkan masyarakat tetap bergantung pada kendaraan pribadi. Akibatnya, jumlah kendaraan pribadi yang jauh lebih dominan dibandingkan transportasi umum memicu kemacetan, peningkatan polusi udara, serta konsumsi bahan bakar yang tinggi. Di sisi lain, kualitas pelayanan angkutan kota juga dinilai rendah, terlihat dari ketidakpastian waktu, kurangnya kenyamanan dan keamanan, tumpang tindih trayek, praktik "*killing time*" oleh pengemudi, serta keterbatasan fasilitas seperti halte dan akses yang memadai. Kondisi ini semakin menurunkan

kepercayaan publik terhadap transportasi umum dan memperlemah perannya sebagai moda mobilitas utama di perkotaan.

Perubahan nama Bus Rapid Transit (BRT) menjadi Metro Jabar Trans (MJT) merupakan langkah strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memperkuat dan menyegarkan kembali kesadaran publik terhadap moda transportasi umum terintegrasi di Bandung Raya (Humas Jabar, 2025). Menanggapi problematika tersebut, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah berupaya mendorong modernisasi sistem transportasi publik sebagai bagian dari reformasi layanan. Salah satu inisiatif terbaru adalah penerapan Metro Jabar Trans (MJT), yang mengusung konsep integrasi koridor transportasi massal dengan layanan pengumpan (*feeder*) yang terjadwal, sistem pembayaran non-tunai, serta peningkatan standar keselamatan dan kenyamanan. Pelaksanaan uji coba layanan feeder MJT di Kota Bandung merupakan langkah konkret untuk mentransformasi angkutan kota konvensional menjadi armada yang lebih terorganisir dan terhubung dengan jaringan transportasi massal, dengan tujuan mendorong peralihan penggunaan moda transportasi pribadi menuju angkutan umum serta mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas (Diskominfo Bandung, 2025).

Namun demikian, berbagai kajian kebijakan dan analisis jaringan trayek menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi MJT memerlukan penataan ulang sistem trayek, penguatan koordinasi antar pemerintah, serta perumusan skema insentif yang tepat bagi operator transportasi. Upaya tersebut penting agar integrasi antarmoda dan keberlanjutan layanan dapat terwujud secara optimal. Dari perspektif perencanaan dan kebijakan, literatur mengenai perencanaan transportasi menegaskan pentingnya penerapan pendekatan terpadu, yang mencakup penataan ruang berbasis *transit-oriented development* (TOD), pengaturan sistem trayek dan halte secara hierarkis, serta penerapan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi guna mewujudkan sistem transportasi yang berkelanjutan. Implementasi Metro Jabar Trans (MJT) sebagai bagian dari upaya reformasi layanan transportasi publik perlu diposisikan sebagai langkah strategis, namun tidak dapat dipandang sebagai solusi tunggal. Program ini harus diintegrasikan dengan perbaikan tata kelola kelembagaan, peningkatan standar kualitas pelayanan, serta penguatan kampanye perubahan perilaku pengguna agar tujuan pengurangan kemacetan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat perkotaan dapat tercapai secara optimal (Tamin, 2008).

Inovasi kebijakan dalam layanan transportasi publik merupakan instrumen strategis yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan, efisiensi operasional, dan kepercayaan

masyarakat terhadap moda transportasi umum. Secara teoretis, inovasi pelayanan publik dipahami sebagai pembaruan yang memberikan keunggulan relatif, dapat diuji dan diamati hasilnya, diterima oleh pengguna, serta selaras dengan konteks lokal, sebagaimana tercermin dalam indikator utama seperti *relative advantage*, *compatibility*, *trialability*, dan *observability*. Implementasi kebijakan ini juga mendorong peralihan pengguna dari kendaraan pribadi ke transportasi umum, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pengurangan kemacetan, penurunan emisi, serta peningkatan aksesibilitas dan keberlanjutan mobilitas perkotaan (Ginting, 2025). Dalam konteks penyelenggaraan layanan transportasi seperti Metro Jabar Trans (MJT), urgensi penelitian mengenai inovasi kebijakan layanan menjadi semakin signifikan. Hal ini disebabkan oleh posisi MJT sebagai salah satu model modernisasi angkutan kota di wilayah Cekungan Bandung yang bertujuan menggantikan sekaligus mensinergikan sistem angkutan kota konvensional (angkot). MJT mengadopsi sistem layanan yang lebih terstruktur melalui penerapan koridor utama, layanan pengumpan (*feeder*), serta integrasi rute dan manajemen operasional yang lebih sistematis (Ripaldi, 2025), meskipun program tersebut telah secara resmi diluncurkan oleh pemerintah provinsi sebagai suatu langkah strategis dalam peningkatan kualitas layanan meliputi pengoperasian enam koridor, pengelolaan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta penambahan rute *feeder* baru (Diskominfo Bandung, 2025). Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan, antara lain terkait mekanisme transformasi operator angkutan konvensional (angkot) menjadi layanan pengumpan (*feeder*), efektivitas integrasi antarmoda, serta pembentukan persepsi masyarakat terhadap layanan transportasi yang baru diterapkan.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa inovasi pelayanan transportasi publik melalui penerapan sistem Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang telah memberikan peningkatan terhadap kualitas pelayanan transportasi umum. Inovasi yang dilakukan meliputi pengembangan sistem *e-ticketing* dan aplikasi berbasis digital untuk memudahkan transaksi dan akses informasi pengguna. Namun, penelitian tersebut juga menemukan adanya kendala seperti keterbatasan teknologi, anggaran jangka pendek, serta ketidakmampuan SDM dalam mengoperasikan sistem baru, sehingga implementasi inovasi belum berjalan maksimal (Dewi & Larasati, 2019). *Kedua*, menunjukkan bahwa implementasi kebijakan TMB belum berjalan optimal. Hasil penelitian menegaskan bahwa manfaat kebijakan belum dirasakan secara signifikan oleh masyarakat, perubahan perilaku penggunaan transportasi publik masih rendah, dan sumber daya baik manusia maupun sarana prasarana masih terbatas (Yuniarti &

Erowati, 2022). *Ketiga*, menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan Trans Metro Bandung (TMB) untuk meningkatkan layanan transportasi umum di Kota Bandung masih belum berjalan dengan baik. Berdasarkan teori George C. Edwards III, ada empat faktor utama yang menjadi kendala, yaitu komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Sosialisasi kepada masyarakat belum efektif karena hanya dilakukan lewat media sosial. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada komunikasi yang jelas, sumber daya yang cukup, dan kerja sama birokrasi yang baik (Taryono & Aritonang, 2024). *Keempat*, memperlihatkan bahwa kualitas pelayanan Trans Metro Bandung memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan masyarakat di Kota Bandung. Berdasarkan hasil analisis regresi sederhana, diketahui bahwa setiap kenaikan kualitas pelayanan sebesar 1% dapat meningkatkan kepuasan masyarakat sebesar 0,794%. Oleh karena itu, peningkatan sarana, ketepatan waktu layanan, dan profesionalitas petugas perlu menjadi prioritas utama untuk meningkatkan kepuasan pengguna Trans Metro Bandung (Buana et al., 2025). *Kelima*, menunjukkan bahwa inovasi pelayanan publik melalui program BRT Trans Metro Deli di Kota Medan memberikan dampak positif bagi masyarakat dengan memenuhi lima indikator inovasi menurut Rogers, yaitu keunggulan relatif, kesesuaian, kerumitan, kemampuan diuji coba, dan kemudahan diamati. Trans Metro Deli memiliki armada dan fasilitas yang baik, tarif terjangkau bahkan gratis, serta pelayanan yang nyaman dan aman. Meskipun sempat mengalami kendala pada penggunaan kartu non-tunai dan keterbatasan informasi rute, secara keseluruhan program ini diterima dengan baik oleh masyarakat dan mampu meningkatkan mobilitas serta kepuasan pengguna transportasi umum (Ginting, 2025).

*State of the art* dalam penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap inovasi kebijakan layanan dalam proses modernisasi angkutan kota konvensional menuju sistem transportasi publik terintegrasi melalui program *Metro Jabar Trans* (MJT) di Kota Bandung. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya berorientasi pada aspek teknis dan operasional, seperti penerapan sistem *Bus Rapid Transit* (BRT), digitalisasi layanan melalui *e-ticketing*, atau optimalisasi jaringan rute, penelitian ini menghadirkan perspektif baru dengan menganalisis bagaimana kebijakan pemerintah daerah, transformasi kelembagaan, adaptasi pelaku transportasi, serta respons masyarakat berperan secara sinergis dalam mewujudkan modernisasi layanan transportasi publik. Pendekatan ini menempatkan inovasi kebijakan bukan sekadar sebagai instrumen teknokratis, melainkan sebagai mekanisme tata kelola adaptif yang mengintegrasikan dimensi regulatif, pelayanan,

teknologi, dan sosial secara berkesinambungan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi kebaruan (*novelty*) terhadap pengembangan kajian administrasi publik dan kebijakan transportasi, dengan menegaskan bahwa keberhasilan modernisasi transportasi tidak hanya ditentukan oleh kemajuan teknologi, tetapi juga oleh rancangan kebijakan yang adaptif, tata kelola yang tangkas, serta tingkat penerimaan sosial masyarakat pengguna.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut (Creswell, 2019), penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan, di mana proses penelitian melibatkan pengumpulan data yang mendalam dalam lingkungan alami (*natural setting*), peneliti sebagai instrumen utama, serta analisis data secara induktif untuk membangun makna dan pola dari data yang diperoleh.

Penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Bandung sebagai instansi pemerintah yang berperan penting dalam pengelolaan dan pengawasan sistem transportasi publik di Kota Bandung. Lokasi ini dipilih karena Dinas Perhubungan merupakan lembaga yang berwenang dalam pelaksanaan program modernisasi transportasi angkutan kota melalui Metro Jabar Trans (MJT), yang menjadi bagian dari upaya inovasi kebijakan layanan publik di sektor transportasi perkotaan.. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Koordinator TMB, dan Koordinator Angkot Feeder.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model menurut (Huberman, 2014), yang mencakup tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan metode, dengan cara membandingkan serta mengonfirmasi hasil dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Melalui langkah ini, diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan objektif mengenai implementasi inovasi kebijakan layanan transportasi modern di Kota Bandung.

Penelitian ini menggunakan teori *Agile Governance*, menurut (Rahardian, 2024) memandang tata kelola pemerintahan sebagai suatu sistem yang tanggap, adaptif, dan mampu merespons perubahan secara cepat melalui perpaduan antara ketangkasan organisasi, efisiensi proses, dan inovasi teknologi. *Agile Governance* menekankan urgensi transformasi budaya birokrasi agar lebih gesit, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Teori ini terdiri atas beberapa dimensi utama, yaitu *good enough governance* (penyesuaian tata kelola

terhadap konteks organisasi), *business driven* (orientasi pada nilai dan efektivitas pengambilan keputusan), *human focused* (penempatan kebutuhan serta partisipasi masyarakat sebagai pusat kebijakan), *based on quick wins* (pencapaian keberhasilan jangka pendek untuk mendorong perubahan), *systemic and adaptive approach* (respons holistik terhadap dinamika lingkungan), serta *simple design and continuous refinement* (perancangan proses yang sederhana disertai perbaikan berkelanjutan).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Modernisasi layanan transportasi publik melalui program Metro Jabar Trans (MJT) mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam membangun sistem transportasi yang efisien, dan mampu menyesuaikan diri dengan dinamika kebutuhan masyarakat perkotaan. Dalam menganalisis proses inovasi kebijakan ini, penelitian ini menggunakan perspektif teori *Agile Governance* untuk menelaah bagaimana prinsip ketangkasan dan fleksibilitas birokrasi diterapkan dalam praktik tata kelola pelayanan publik. Penerapan enam dimensi utama dalam teori *Agile Governance* meliputi *good enough governance*, *business driven*, *human focused*, *based on quick wins*, *systemic and adaptive approach*, serta *simple design and continuous refinement* digunakan sebagai landasan analisis untuk menilai sejauh mana kebijakan dan sistem transportasi Metro Jabar Trans (MJT) mampu mencerminkan karakter tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

### ***1. Good Enough Governance***

Pendekatan ini didasarkan pada kesadaran bahwa banyak lembaga pemerintahan di negara berkembang menghadapi keterbatasan sumber daya, kapasitas kelembagaan, dan kompleksitas birokrasi yang tinggi. Akibatnya, seringkali sulit untuk mencapai tata kelola yang ideal dalam waktu singkat (Grindle, 2007). Dalam MJT, upaya Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung untuk mengubah sistem pengelolaan transportasi publik secara bertahap dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat adalah bukti dari prinsip *Good Enough Governance*. Penerapan tata kelola difokuskan pada pencapaian hasil pelayanan yang nyata. Fokus tersebut diwujudkan melalui pengembangan armada *feeder* yang terintegrasi, penerapan sistem pembayaran nontunai berbasis QRIS, serta penetapan standar pelayanan minimum (SPM) yang disesuaikan dengan kapasitas sumber daya yang tersedia. Pendekatan ini menunjukkan pemahaman bahwa tata kelola yang baik tidak harus sempurna, tetapi harus

cukup efektif untuk memastikan layanan publik dapat berjalan dengan optimal dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

MJT berada di bawah pengawasan dan regulasi Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung. Sementara itu, PT Jasa Sarana sebagai BUMD memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan fungsi manajerial dan teknis. Setiap pihak menjalankan perannya sesuai dengan kapasitas dan kompetensi masing-masing, sehingga mencerminkan penerapan manajemen yang adaptif dan inklusif. Koordinasi antarinstansi umumnya dilakukan melalui rapat evaluasi bulanan serta penyusunan laporan operasional. Walaupun pelaksanaannya belum sepenuhnya memenuhi prinsip *good governance*, seperti transparansi menyeluruh atau digitalisasi laporan secara penuh, mekanisme yang ada telah membentuk rantai akuntabilitas yang menjadi unsur penting dalam tata kelola publik. Struktur kerja tersebut dinilai cukup memadai untuk memastikan keberlanjutan program serta percepatan penanganan berbagai permasalahan operasional.

Pemerintah berupaya menyeimbangkan kebijakan yang bersifat *top-down* dengan aspirasi masyarakat sebagai pengguna layanan, yang tercermin dalam penerapan tata kelola yang cukup responsif. Upaya ini didukung oleh hasil survei kepuasan pengguna serta laporan lapangan yang dikumpulkan melalui aplikasi dan media sosial, yang kemudian menjadi dasar dalam penyesuaian rute, jadwal, maupun metode pembayaran. Bentuk partisipasi publik tersebut menunjukkan bahwa tata kelola yang adaptif tidak hanya bergantung pada instruksi administratif, tetapi juga pada pertimbangan sosial dan kultural dari para pengguna. Dalam konteks ini, tata kelola MJT tidak hanya menekankan aspek teknis transportasi, tetapi juga berorientasi pada pembangunan kepercayaan publik melalui komunikasi yang jelas dan transparan.

Meskipun demikian, implementasi tata kelola yang memadai pada MJT masih menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa kendala utama meliputi keterbatasan jumlah armada, ketidakmerataan infrastruktur halte, serta adanya resistensi dari operator angkutan konvensional. Selain itu, koordinasi antarmoda dan integrasi sistem data yang belum optimal turut menghambat terwujudnya tata kelola yang lebih efektif. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah daerah melakukan perbaikan secara bertahap melalui pendekatan berbasis data, pelibatan komunitas transportasi, serta penyesuaian kebijakan lintas sektor.

Secara keseluruhan, penerapan konsep *Good Enough Governance* dalam program MJT menunjukkan strategi tata kelola yang pragmatis, fleksibel, dan berorientasi pada pencapaian hasil yang realistis. Pemerintah Kota Bandung tidak berupaya meniru model tata kelola ideal yang mungkin sulit diterapkan dalam konteks lokal, melainkan memusatkan perhatian pada capaian yang dapat menjamin keberlanjutan layanan publik.

## **2. *Business Driven***

Prinsip-prinsip bisnis dalam pengelolaan Metro Jabar Trans (MJT) diwujudkan melalui skema *Buy The Service (BTS)*, yaitu mekanisme pemerintah membeli layanan dari operator berdasarkan capaian kinerja, bukan dari banyaknya penumpang yang berhasil diangkut. Dalam kerangka *business-driven*, pendekatan ini menekankan efisiensi, akuntabilitas, serta keberlanjutan sebagai orientasi utama. Melalui pola pembayaran per kilometer yang disesuaikan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), operator dapat fokus meningkatkan mutu layanan tanpa harus terlibat dalam persaingan komersial. Di sisi lain, Dinas Perhubungan (Dishub) memegang peran sebagai pengawas pelaksanaan standar operasional. Untuk meminimalkan ketergantungan pada subsidi pemerintah sekaligus memperkuat kemandirian finansial transportasi publik, pemerintah juga mendorong pengembangan pendapatan *non-farebox*. Upaya ini meliputi kerja sama periklanan, kemitraan dalam penyediaan fasilitas halte, hingga skema penamaan rute untuk tujuan komersial (Noer et al., 2025).

Modernisasi dan digitalisasi layanan menjadi prioritas strategis dalam meningkatkan daya saing Metro Jabar Trans (MJT). Pemerintah telah menerapkan sistem pembayaran nontunai berbasis QRIS, menetapkan standar armada dengan fasilitas pendingin udara, serta mengembangkan aplikasi resmi Metro Jabar Trans. Melalui aplikasi tersebut, pengguna dapat mengakses informasi mengenai posisi bus, perkiraan waktu kedatangan, serta lokasi halte secara real time. Penerapan teknologi ini tidak hanya meningkatkan transparansi bagi masyarakat, tetapi juga memungkinkan evaluasi kinerja operator secara berkesinambungan.

Selain itu, fokus Dinas Perhubungan tidak diarahkan untuk menciptakan kompetisi pasar, melainkan pada penataan dan integrasi layanan transportasi umum. Salah satu langkah strategisnya adalah mengalihkan fungsi angkutan kota konvensional menjadi layanan pengumpan (*feeder*) yang terkoneksi dengan koridor utama MJT. Pendekatan ini menegaskan bahwa orientasi bisnis sektor transportasi publik bukan semata-mata untuk memperoleh keuntungan finansial, tetapi untuk memastikan efisiensi operasional, peningkatan kualitas

layanan, serta optimalisasi integrasi sistem transportasi publik secara menyeluruh (Zaidan et al., 2025).

Meskipun pendekatan berbasis prinsip-prinsip bisnis telah diterapkan, berbagai persoalan operasional masih muncul di lapangan, seperti keterbatasan anggaran, keterlambatan kedatangan armada, serta penolakan dari perusahaan angkutan konvensional yang berdampak proses transformasi. Dinas Perhubungan merespons tantangan tersebut melalui beberapa langkah, termasuk penyesuaian waktu tunggu (*headway*), perluasan jangkauan koridor layanan, serta peningkatan kualitas komunikasi publik melalui berbagai platform digital. Arah kebijakan ini menunjukkan adanya pergeseran menuju sistem transportasi yang lebih profesional, efektif, dan berorientasi pada penciptaan nilai publik, meskipun implementasi MJT hingga kini masih sangat bergantung pada dukungan proyek pemerintah. Dengan demikian, dimensi *business-driven* dalam model pemerintahan yang cepat (*agile governance*) tidak sekadar menekankan aspek keuntungan finansial, tetapi juga diarahkan untuk menghasilkan nilai sosial melalui efisiensi operasional, transparansi, dan peningkatan mutu layanan publik secara berkelanjutan (Noer et al., 2025).

### **3. *Human Focused***

Seluruh proses inovasi dan pengambilan keputusan dalam implementasi kebijakan Metro Jabar Trans (MJT) diarahkan pada pendekatan yang berorientasi pada dimensi manusia. Prinsip tersebut bertujuan memastikan bahwa kebijakan transportasi di Kota Bandung tidak hanya berfokus pada efisiensi teknis, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan sosial, budaya, serta kenyamanan masyarakat pengguna. Partisipasi publik difasilitasi melalui berbagai saluran komunikasi, seperti forum diskusi, survei kepuasan, serta akun media sosial resmi Dinas Perhubungan Kota Bandung. Melalui platform tersebut, masyarakat dapat menyampaikan tanggapan, keluhan, maupun saran terkait pelayanan MJT, termasuk ketepatan waktu operasional, kebersihan armada, dan fasilitas halte. Seluruh masukan yang diterima kemudian diolah oleh Dinas Perhubungan sebagai dasar evaluasi berkala bersama BUMD PT Jasa Sarana guna meningkatkan kualitas layanan transportasi publik.

Dalam konteks inklusi, pemerintah daerah berupaya memperluas aksesibilitas layanan transportasi bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti pelajar, lanjut usia, dan penyandang disabilitas. Upaya tersebut diwujudkan melalui penerapan sistem pembayaran non-tunai berbasis QRIS dan NFC yang mudah digunakan, penyediaan halte

yang ramah disabilitas, serta penggunaan armada bus dengan desain lantai rendah. Implementasi kebijakan ini sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 mengenai Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal, yang menekankan pentingnya penyelenggaraan layanan transportasi publik yang inklusif, aman, dan dapat diakses oleh seluruh pengguna.

Dalam penentuan rute serta kapasitas armada *feeder*, pemerintah mempertimbangkan kondisi geografis dan dinamika sosial Kota Bandung yang memiliki kepadatan wilayah tinggi. Penyesuaian jalur dilakukan agar layanan transportasi dapat menjangkau kawasan permukiman tanpa menimbulkan potensi kemacetan baru. Selain itu, pemanfaatan aplikasi digital Metro Jabar Trans mendukung kemudahan akses informasi bagi pengguna, termasuk perencanaan perjalanan dan pemantauan posisi armada secara real-time, sehingga berkontribusi pada peningkatan efisiensi mobilitas harian masyarakat.

Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan sebelum sistem pengaduan terintegrasi dapat berfungsi secara optimal. Hingga saat ini, sebagian besar masukan dari masyarakat masih disampaikan secara manual atau melalui media sosial tanpa mekanisme pemantauan yang sistematis. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah tengah mengembangkan sistem pelaporan berbasis internet, yaitu *e-feedback system*, yang dirancang untuk memantau, mencatat, dan menindaklanjuti setiap keluhan secara lebih cepat, transparan, dan terukur. Inovasi yang diterapkan pada layanan MJT berbasis pendekatan *human-centered* tidak hanya meningkatkan kualitas dan modernisasi transportasi publik di Kota Bandung, tetapi juga memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Melalui pendekatan yang menempatkan pengalaman pengguna sebagai prioritas utama, kebijakan ini berfokus pada kebutuhan dan kenyamanan pengguna akhir, bukan semata-mata pada aspek sistem dan teknologi.

#### ***4. Based On Quick***

Dimensi *Based on Quick Wins* dalam pengembangan Metro Jabar Trans (MJT) di Kota Bandung diterapkan sebagai strategi pemerintah untuk menghadirkan hasil nyata secara cepat dan langsung dirasakan oleh masyarakat. Pendekatan ini dijalankan secara terpadu dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan program. Berdasarkan wawancara dengan operator *feeder* dan Dinas Perhubungan Kota Bandung, strategi *quick wins* tersebut diwujudkan melalui penyediaan layanan *feeder* yang menjangkau kawasan permukiman yang

sebelumnya kurang terlayani oleh transportasi umum. Melalui pola kerja sama berbasis koperasi, kebijakan ini turut memperkuat konektivitas antarwilayah.

Berbagai inovasi sederhana namun berdampak signifikan turut mendukung efisiensi layanan dan meningkatkan kepuasan pengguna, seperti penerapan pembayaran nontunai berbasis QRIS, pemberlakuan tarif integrasi nol rupiah bagi penumpang yang melakukan perpindahan moda, serta pengurangan waktu kedatangan armada (*headway*) menjadi lima menit pada jam sibuk. Peningkatan jumlah penumpang sebesar 8% dalam tiga bulan pertama menjadi indikator keberhasilan awal strategi tersebut. Selain itu, masyarakat juga memberikan respons positif terhadap pengembangan layanan transportasi berbasis digital. Keberlanjutan program turut diperkuat melalui dukungan pendanaan dari Bank Dunia untuk pembangunan infrastruktur seperti halte, depo, dan jalur khusus bus. Temuan ini menunjukkan bahwa inovasi cepat yang diluncurkan pemerintah dapat menjadi fondasi bagi sistem transportasi publik yang berkelanjutan dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat perkotaan.

### **5. Dimensi Systemic and Adaptive Approach**

MJT dan Dinas Perhubungan Kota Bandung telah menunjukkan kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan perubahan cepat di bidang transportasi perkotaan dengan memperbarui layanan, bekerja sama dengan organisasi lintas sektor, dan melakukan inovasi berkelanjutan. Pengembangan layanan melibatkan pemerintah daerah, swasta, dan komunitas. Ini membantu meningkatkan sinergi dan memastikan kebijakan yang adaptif terhadap perubahan di lapangan. Penyesuaian layanan koridor didasarkan pada kebutuhan dan situasi saat ini. Ini termasuk penambahan rute baru, penggabungan *feeder* dari kawasan pemukiman, dan penggunaan sistem transportasi pintar (ITS) untuk melacak lalu lintas secara *real-time* (Hadi et al., 2024).

Dalam implementasi kebijakan transportasi berbasis Metro Jabar Trans, pemerintah berperan sebagai regulator, sementara BUMD dan operator swasta berfungsi sebagai penyedia layanan, serta komunitas lokal turut serta dalam proses transformasi angkutan kota. Untuk memastikan keselarasan dengan rencana tata ruang wilayah, pembangunan infrastruktur, dan aspek keselamatan transportasi, Dinas Perhubungan menjalin kolaborasi dengan Bappeda, dinas tata ruang, serta pihak kepolisian. Di sisi lain, kerja sama dengan Bank Indonesia, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), dan penyedia teknologi mendukung pengembangan sistem inovatif dalam percepatan transaksi, pembaruan

mekanisme pembayaran, pemantauan armada, serta pengelolaan data penumpang (Ramdani, 2017). Selain itu, guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta membangun budaya kerja aparatur yang adaptif dan berorientasi solusi, partisipasi publik difasilitasi melalui Forum Diskusi Transportasi Bandung (FDTB) dan kanal media sosial yang juga dimanfaatkan sebagai sarana survei kepuasan masyarakat (Noer et al., 2025).

## **6. Desain Sederhana dan Perbaikan Berkelanjutan**

Dalam dimensi ini, fokus utama Metro Jabar Trans (MJT) adalah untuk menerapkan prinsip penyederhanaan sistem layanan serta melakukan evaluasi rutin setiap bulan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung dan BUMD PT Jasa Sarana untuk memastikan keberlanjutan program transportasi publik di wilayah Bandung Raya. Kegiatan evaluasi ini mencakup pemantauan kinerja armada, perawatan kendaraan, dan peningkatan fasilitas pendukung seperti halte dan sistem pembayaran digital. Penggantian halte virtual menjadi halte permanen untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengguna merupakan salah satu bentuk perbaikan teknis yang sedang dilakukan. Untuk membuat operasional MJT tidak sepenuhnya bergantung pada APBD, pemerintah juga menerapkan mekanisme pembiayaan kreatif. Untuk menjamin keberlanjutan kebijakan transportasi meskipun pergantian pemerintahan, pemerintah provinsi Jawa Barat juga bertanggung jawab untuk menyusun peraturan lintas periode kepemimpinan (Zaidan et al., 2025). Saat ini, MJT menjalankan enam koridor pelayanan yang meliputi Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang. Untuk meningkatkan efisiensi transaksi dan transparansi keuangan, sistem pembayaran non-tunai berbasis QRIS mengenakan tarif tetap sebesar Rp 4.900 untuk setiap perjalanan (Noer et al., 2025) Sebagai bagian dari rencana modernisasi transportasi publik, layanan ini mulai beroperasi pada 21 Desember 2021. Pada 1 Januari 2025, secara resmi direbranding menjadi Metro Jabar Trans (Noer et al., 2025).

Meskipun terjadi kemajuan besar dalam digitalisasi dan manajemen operasional, masih ada masalah, terutama berkaitan dengan jangkauan rute dan penyebaran informasi kepada masyarakat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Universitas Padjadjaran pada tahun 2025, jumlah pengguna MJT relatif kecil karena pemahaman masyarakat tentang sistem MJT masih rendah. Selain itu, beberapa halte belum memenuhi persyaratan kenyamanan yang ideal (Noer et al., 2025).

Secara keseluruhan, MJT berusaha mewujudkan model transportasi publik yang modern, efisien, dan responsif melalui penyederhanaan sistem, evaluasi berbasis data,

perbaikan infrastruktur, dan manajemen keuangan yang berkelanjutan. Metode ini diperkuat dengan menggunakan standar TransJakarta sebagai standar desain operasional, meskipun disesuaikan dengan keadaan sosial dan geografis Kota Bandung. Oleh karena itu, prinsip Continuous Refinement and Simple Design berfungsi sebagai kerangka teknis dan strategi kebijakan untuk memastikan bahwa sistem transportasi publik akan tetap konsisten, relevan, dan berkelanjutan di masa mendatang.

Berdasarkan analisis terhadap enam dimensi *Agile Governance* yang diterapkan pada program Metro Jabar Trans (MJT), dapat diketahui bahwa inovasi kebijakan layanan transportasi publik di Kota Bandung telah menunjukkan adanya pergeseran tata kelola menuju sistem yang lebih responsif, adaptif, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat. Implementasi kebijakan yang dilakukan secara bertahap mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menyesuaikan strategi dengan keterbatasan sumber daya yang tersedia. Pembaruan tidak hanya terjadi pada aspek digitalisasi layanan dan penguatan manajemen operasional, tetapi juga mencakup dimensi sosial melalui upaya integrasi moda transportasi yang telah ada serta perluasan aksesibilitas bagi seluruh pengguna layanan.

Meskipun perkembangan inovasi tersebut memberikan arah yang positif, pencapaian efektivitas kebijakan masih belum maksimal. Tantangan berupa keterbatasan jumlah armada, ketidakmerataan jangkauan rute, dan tingkat pemahaman masyarakat yang belum merata mengenai sistem layanan baru masih menjadi faktor yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan komunikasi publik, peningkatan ketersediaan infrastruktur pendukung, serta pengembangan kapasitas pelaksana kebijakan agar tujuan modernisasi transportasi publik dapat tercapai secara optimal. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan transformasi tata kelola transportasi tidak hanya bergantung pada kesiapan teknis dan regulatif, tetapi juga pada seberapa besar dukungan dan keterlibatan masyarakat dalam mendukung perubahan mobilitas.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dinyatakan bahwa inovasi kebijakan layanan pada program Metro Jabar Trans (MJT) berperan sebagai instrumen kunci Pemerintah Kota Bandung dalam mempercepat modernisasi sistem transportasi publik serta menekan dominasi penggunaan kendaraan pribadi di wilayah perkotaan. Penerapan prinsip *Agile Governance* menjadi landasan bagi perubahan tata kelola yang lebih tanggap dan fleksibel melalui peningkatan standar operasional, implementasi teknologi digital dalam pembayaran, penguatan konektivitas antarmoda, serta pelaksanaan evaluasi berkelanjutan yang

berorientasi pada peningkatan mutu layanan. Upaya modernisasi tersebut memperlihatkan tekad pemerintah dalam menghadirkan transportasi publik yang efisien, inklusif, dan sesuai dengan dinamika kebutuhan mobilitas masyarakat. Namun, capaian kebijakan sejauh ini belum menunjukkan hasil optimal karena masih terdapat keterbatasan jumlah armada, ketidakseimbangan distribusi layanan, serta rendahnya tingkat pemahaman dan penerimaan publik terhadap sistem transportasi baru tersebut. Kondisi tersebut mengisyaratkan perlunya intensifikasi sosialisasi, penguatan fasilitas pendukung, dan strategi peningkatan keterlibatan masyarakat secara lebih terstruktur.

Penelitian ini memiliki keunggulan karena memberikan kontribusi baru dalam kajian inovasi kebijakan layanan transportasi, dengan tidak hanya menyoroti aspek teknis operasional, tetapi juga menelaah dimensi regulasi, tata kelola, dan sosial yang turut menentukan tingkat keberhasilan implementasi MJT di Kota Bandung. Pemanfaatan teori *Agile Governance* sebagai kerangka analisis juga memperkuat argumentasi penelitian dalam memahami praktik tata kelola modern yang menekankan kolaborasi, responsivitas, dan penciptaan nilai publik. Selain itu, resistensi dari operator angkutan konvensional sebagai pihak yang terdampak transformasi belum menjadi fokus kajian secara mendalam, padahal aspek tersebut memiliki pengaruh penting terhadap keberlanjutan kebijakan. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan analisis dan menggabungkan metode pengumpulan data sehingga dapat memberikan dukungan evidensial yang lebih kuat bagi pengembangan kebijakan transportasi publik yang berkelanjutan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bandung, D. (2025). *Metro Jabar Trans Resmi Diluncurkan, Transportasi Massal Modern Bandung Raya*. <https://www.jabarprov.go.id/berita/metro-jabar-trans-resmi-diluncurkan-transportasi-massal-modern-bandung-raya-17017>
- Creswell, John W. (2019). *RESEARCH DESIGN pendekatan metode kualitatif, kuantitatif dan campuran*. pustaka pelajar.
- Engelbertha Noviani Bria Serab, dan T. B. Jeawono. (2019). Atribut Kualitas Pelayanan ANgkutan Publik di Kota Bandung. *Jurnal Teknik Sipil*, 11(2), 109–131. <https://doi.org/10.28932/jts.v11i2.1406>
- Fadlurahman, I. (2025). *Jumlah Kendaraan Bermotor di Kota Bandung (15 April 2025)*. Databoks.Katadata.Co.Id.
- Grace. (2025). Inovasi Pelayanan Publik dalam Pengadaan Transportasi Umum. *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 4(1), 75–86. <https://doi.org/10.55606/inovasi.v4i1.4188>
- Grace Desy Hanatasha Ginting. (2025). Inovasi Pelayanan Publik dalam Pengadaan Transportasi Umum. *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 4(1), 75–86.

<https://doi.org/10.55606/inovasi.v4i1.4188>

- Grindle, M. S. (2007). *Good Enough Governance Revisited*. 25(5), 553–574.
- Hadi, P. L., Sutandi, A. C., Santosa, W., Wasanta, T., & Prasetijo, J. (2024). *The Impact of Intelligent Transportation System in Reliability of Bus Rapid Transit in the City of Bandung*. 1(2), 72–78.
- Harahap, F. R. (2013). Dampak Urbanisasi Bagi Perkembangan Kota Di Indonesia. *Society*, 1(1), 35–45. <https://doi.org/10.33019/society.v1i1.40>
- Humas Jabar. (n.d.). *Bey Machmudin Luncurkan “Rebranding” BRT Jadi Metro Jabar Trans*.
- Indrianawati, sumarno, dan teddy sellan. (2023). Analisis Jangkauan Layanan Halte Trans Metro Pasundan Terhadap Lokasi Perguruan Tinggi di Wilayah Bandung Raya. *Jurnal Serambi Engineering*, 8(4). <https://doi.org/10.32672/jse.v8i4.6803>
- Larasati, D. dan. (2019). *Inovasi Pelayanan Transportasi Publik Brt (Bus Rapid Transit) Trans Semarang Oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang*. 1–9.
- Matthew B. Miles, A. Micahel Huberman, J. S. (2014). *qualitative data analysis a methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE.
- Noer, A., Mulyawan, R., & Taryana, A. (2025). *Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Metro Trans Jabar Untuk Mengatasi Kemacetan Di Cekungan Bandung*. 8, 327–339. <https://doi.org/10.24198/responsive.v8i2.64067>
- Nurcahyono, N., Munandar, A., & Hardi, O. S. (2023). Analisis Penggunaan Moda Transportasi Bagi Pekerja Komuter (Studi Kasus Kecamatan Gunung Putri). *Jurnal Transportasi*, 23(3), 177–184. <https://doi.org/10.26593/jtrans.v23i3.7551.177-184>
- Rahardian, R. (2024). *Teori-Teori Governansi dan Kebijakan Publik Kontemporer* (Noviastuti Putri Indrasari (ed.)). BRIN.
- Ramdani, A. (2017). *Kajian integrasi rute angkutan umum di kota bandung*. 4(November), 827–834.
- Ramdani, A. (2018). *Kajian integrasi rute angkutan umum di kota bandung*. *Jurnal Planologi*, 4(November), 827–834.
- Ripaldi, D. (n.d.). *Pemprov Jabar Rilis Transportasi Massal MJT, Cek Rute dan Tarifnya*.
- Satria et al. (2025). Pengaruh Kualitas Pelayanan Transportasi Publik Trans Metro Bandung Terhadap Tingkat Kepuasan Masyarakat Kota Bandung. *Jurnal Praxis Idealis: Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan*, 02(01).
- Tamin, O. z. (2008). Perencanaan Pemodelan Transportasi ( Edisi Kedua ). In *Jurusan Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung*.
- Taryono, A., & ... (2024). Implementasi Kebijakan Trans Metro Bandung (TMB) Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Transportasi Publik Di Kota Bandung. ... *Publik Dan ...*, 3(2), 128–140.
- Yuniarti, N. G., & Erowati, D. (2022). Implementasi Kebijakan Trans Metro Bandung ( Tmb ) Dalam Mengatasi Kemacetan Di Kota Bandung Tahun 2022 Policy Implementation of the Trans Metro Bandung ( Tmb ) Program To Overcome Congratulations in the City of

Bandung in 2022. *Sosiohumaniora*, 1(2), 1–18.

Zaidan, A. Y., Muliastari, A., & Setyaningsih, R. (n.d.). *Penataan Jaringan Trayek Angkutan Umum Sebagai Feeder Metro Jabar Trans di Kabupaten Bandung Arrangement of Public Transportation Route Network as Feeder for Metro Jabar Trans in Bandung Regency Pendahuluan Metode Penelitian Analisis dan Pemecahan Masalah*. xx(x), 1–11. <https://doi.org/10.55511/jpsttd.vxxix.xx>